



## Peran Kebijakan Ekonomi Biru dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan di Kota Tanjung Pinang

Hoki Apriyenson<sup>1\*</sup>, Aria Bagiasa Chidmahdjati<sup>2</sup>, Nefriwati Hilmi<sup>3</sup>, Dea Rizky Saputri<sup>4</sup>,  
Arie Afriadi<sup>5</sup>, Zuleriwati AS<sup>6</sup>,

<sup>1-6</sup> Program Studi perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Tanjungpinang, Indonesia

Korespondensi penulis: [hokiapriyenson@umrah.ac.id](mailto:hokiapriyenson@umrah.ac.id) \*

**Abstract.** *The implementation of blue economy policies in Tanjungpinang City, the capital of Riau Islands Province, aims to foster sustainable urban development by leveraging marine and coastal resources. This study explores the potential and opportunities of blue economy principles to enhance economic growth, social welfare, and environmental sustainability. Utilizing a qualitative approach, the research evaluates local government policy documents and collaborates with industry stakeholders to assess the impact of these policies. Findings reveal that Tanjungpinang's strategic maritime location supports significant fishery production (118,661 tons in 2023) and tourism growth, creating jobs and reducing coastal poverty. Key programs include sustainable marine resource management, fishery processing industry development, human resource capacity building, market access optimization, eco-friendly infrastructure, and environmental policy enforcement. These initiatives promote ecological sustainability, economic value, and social inclusivity. However, challenges such as limited processing scales, resource continuity, and environmental pollution persist. The study underscores the need for coordinated governance, technological investment, and community participation to ensure long-term benefits. Tanjungpinang's blue economy model offers a replicable framework for sustainable urban development in coastal regions.*

**Keywords:** *Blue Economy, Sustainable Development, Tanjungpinang, Marine Resources, Urban Planning*

**Abstrak.** Implementasi kebijakan ekonomi biru di Kota Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, bertujuan mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Penelitian ini mengkaji potensi dan peluang prinsip ekonomi biru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian mengevaluasi dokumen kebijakan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan industri untuk menilai dampak kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi maritim strategis Tanjungpinang mendukung produksi perikanan yang signifikan (118.661 ton pada 2023) dan pertumbuhan pariwisata, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan pesisir. Program utama meliputi pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan, pengembangan industri pengolahan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi akses pasar, infrastruktur ramah lingkungan, dan penegakan kebijakan lingkungan. Inisiatif ini mempromosikan keberlanjutan ekologi, nilai ekonomi, dan inklusivitas sosial. Namun, tantangan seperti skala pengolahan yang terbatas, kontinuitas sumber daya, dan polusi lingkungan masih ada. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola terkoordinasi, investasi teknologi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan manfaat jangka panjang. Model ekonomi biru Tanjungpinang dapat menjadi contoh bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

**Kata kunci:** Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan, Tanjungpinang, Sumber Daya Kelautan, Perencanaan Perkotaan

## **1. LATAR BELAKANG**

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran karena berada antara Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. Menurut Pemerintah Kota Tanjungpinang (2023), sektor perikanan memiliki total produksi perikanan yang signifikan (tangkap dan budidaya) mencapai 118,661. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada nelayan dan mengatur tata ruang wilayah untuk pengembangan budidaya. Hal tersebut merupakan program pemerintah untuk mengembangkan konsep ekonomi biru di kota tanjungpinang.

Pembangunan perkotaan berbasis ekonomi biru merupakan suatu konsep pembangunan yang mencakup pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. (Septianda, 2024) Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan pantai. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut dan pesisir secara bijaksana, di harapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Wulandari, 2015) Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang dalam pengembangan pembangunan perkotaan berbasis ekonomi biru guna memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Melalui pembangunan berbasis ekonomi biru, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di kawasan pesisir. (Yuli, Deden, Jumlah, & Kemiskinan, 2022) Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, kita juga dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang. (Rhofita, 2022) Dengan demikian, pembangunan berbasis ekonomi biru merupakan langkah yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan pesisir.

Misalnya, di sebuah kota pesisir yang sangat bergantung pada perikanan untuk ekonominya, meningkatnya permintaan akan makanan laut dapat menyebabkan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan penipisan stok ikan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi juga kesulitan ekonomi bagi nelayan lokal dan komunitas mereka karena mata pencaharian mereka terancam. Tanpa pengelolaan dan regulasi yang tepat, eksploitasi sumber daya laut dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan baik bagi lingkungan maupun bagi orang-orang yang bergantung pada sumber daya ini untuk mata pencaharian mereka. Sangat penting bagi pemerintah dan industri untuk bekerja sama dalam menerapkan praktik berkelanjutan yang memastikan kesehatan jangka panjang lautan kita dan distribusi sumber daya yang adil di antara populasi pesisir. Dengan

mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berinvestasi dalam sumber pendapatan alternatif untuk komunitas pesisir, kita dapat membantu mengurangi dampak negatif dari eksploitasi berlebihan dan memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi ekosistem laut dan orang-orang yang bergantung padanya.

Pembangunan berbasis ekonomi biru di Kota Tanjungpinang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di kawasan pesisir. Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang. Langkah ini merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Tanjungpinang. Dengan adanya pembangunan berbasis ekonomi biru, diharapkan Kota Tanjungpinang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh stakeholders yang terlibat. Dalam penelitian ini diharapkan dapat melihat kolaborasi pemerintah dan Industri dalam implementasi kebijakan ekonomi biru, melihat dampak ekonomi biru terhadap Pembangunan perkotaan, dan melihat implikasi kebijakan ekonomi biru terhadap pembangunan perkotaan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Ekonomi Biru adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan menjaga kesehatan ekosistem laut (Prayuda & Sary, 2019). Menurut (Abdul Latif & Wafa, 2023) terdapat beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Biru merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

(Nature's Efficiency) adalah prinsip yang menekankan pentingnya menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan siklus produksi ekosistem alam, bertujuan untuk memperkaya sumber daya alam yang ada, mengurangi eksploitasi berlebihan, dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya tidak merusak keseimbangan ekologis.

Zero Waste (Tanpa Limbah) merupakan prinsip fundamental yang mendorong pengolahan kembali limbah atau sampah dari suatu sumber daya agar dapat diubah menjadi bahan yang bermanfaat, sehingga mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan dan menciptakan nilai tambah dari bahan yang sebelumnya dianggap tidak berguna.

**Keberlanjutan Lingkungan:** Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak merusak lingkungan, melainkan justru memperkuat kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

**Efisiensi dan Inovasi:** Berupaya mengurangi biaya produksi dan konsumsi melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan inovatif. Konsep ini juga memicu inovasi dan kehadiran teknologi yang tepat guna, seperti untuk sumber energi alternatif.

**Inklusivitas Sosial:** Ekonomi Biru mengandalkan pengelolaan sumber daya lokal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, seperti nelayan dan petani ikan. Hal tersebut berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar merata di seluruh komunitas.

**Sistem Produksi Siklis dan Adaptasi Terbuka:** Ini adalah dua dari lima prinsip inti yang harus ada dalam konsep ekonomi biru, yang mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adaptif.

Ekonomi biru berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan bagi komunitas lokal, dan mengurangi kemiskinan di daerah pesisir. (Lutvia, Hadis, Dimas, Ariska, & Budiman, 2021) Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, kita juga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (Sridadi, 2024) Oleh karena itu, membangun ekonomi biru adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah pesisir (Darajati, 2023). Konsep ekonomi biru dan pembangunan perkotaan berkelanjutan akan dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami implikasinya bagi komunitas pesisir (Noor, 2022). Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat menguntungkan komunitas lokal, ada risiko eksploitasi berlebihan sumber daya laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati (Haeril, 2024). Selain itu, fokus pada keuntungan ekonomi mungkin memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang dan distribusi sumber daya yang adil di antara populasi pesisir.

Melalui insentif ekonomi yang mendorong praktik berkelanjutan, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam memastikan kelangsungan hidup sumber daya laut yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. (Emiel et al., 2024) Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal, kita dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masa depan laut kita. (Edoardus & Ransta, 2020) Contoh konkretnya adalah ketika pemerintah memberikan insentif pajak bagi industri perikanan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan jaring yang tidak merusak

terumbu karang. Hal ini akan mendorong praktik berkelanjutan dalam industri perikanan dan pada akhirnya menjaga keseimbangan ekosistem laut serta keberlangsungan mata pencaharian. Kolaborasi ini juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam program-program pelestarian laut, seperti kampanye pembersihan pantai atau penanaman terumbu karang. Dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan laut yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Melindungi laut bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tugas bersama yang harus dilakukan secara bersinergi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem laut (Sephthian, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengevaluasi dokumen-dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Menurut Creswell, (2014) Penelitian kualitatif adalah "suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks terkait kebijakan ekonomi biru serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dirasakan di tingkat lokal. Hal ini memungkinkan peneliti memahami proses, kendala, serta peran berbagai aktor dalam pelaksanaan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini sangat relevan mengingat Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah maritim dengan luas laut yang dominan dan memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah di Kota Tanjungpinang, sebagai bagian dari Kepulauan Riau, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam mengoptimalkan potensi lautnya untuk pembangunan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data dan studi dokumentasi berupa dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan dan lain-lain.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran dan perdagangan dunia, serta kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Posisi ini menjadikan implementasi konsep "ekonomi biru" sangat relevan, di mana pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.

## A. Kolaborasi Pemerintah dan Industri dalam Menerapkan Kebijakan Ekonomi Biru

Kolaborasi pemerintah dan swasta akan menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi industri, memungkinkan Tanjungpinang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga kelestarian sumber daya lautnya untuk generasi mendatang, sejalan dengan visi kota yang "Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani" dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menerapkan kebijakan ekonomi biru dan mempromosikan praktik berkelanjutan di sektor kelautan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Kolaborasi Pemerintah dan Industri dalam Menerapkan Kebijakan Ekonomi Biru

No	Program	Arah Kebijakan Pemerintah	Peran dan Kolaborasi Industri
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan	Pemerintah berkomitmen pada pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan dengan menekankan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup	Sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, harus menerapkan metode yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Kolaborasi dapat mencakup pelatihan penggunaan alat tangkap selektif, praktik budidaya lestari, dan pengelolaan limbah perikanan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut.
2	Integrasi Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan (Hilirisasi)	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengarahkan kawasan industri Dompok Darat untuk industri pengolahan hasil laut, ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan. Ada kebijakan untuk "pembangunan industri pengolahan rumput laut maupun pengolahan ikan. Pemerintah juga berupaya mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai "pusat perdagangan dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.	Mengembangkan kapasitas pengolahan ikan dan produk laut lainnya untuk meningkatkan nilai tambah (hilirisasi) dan memenuhi standar pasar yang lebih tinggi, termasuk pasar ekspor. Kolaborasi dengan pemerintah dapat difokuskan pada penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dan akses ke fasilitas pengolahan, serta mengatasi kendala seperti skala produksi olahan yang masih terbatas (skala rumah tangga) dan kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki program untuk mengembangkan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan	Industri dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pelatihan untuk merancang kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri

		kelautan serta meningkatkan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi di bidang industri. Melaksanakan pelatihan bersertifikasi bagi calon pekerja.	kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, mencakup teknik penangkapan/budidaya lestari, pengolahan yang higienis, manajemen rantai pasok, dan standar mutu. Hal ini penting untuk mengatasi keterbatasan keterampilan SDM di Industri Kecil Menengah (IKM)
4	Optimalisasi Akses Pasar dan Promosi Produk Berkelanjutan	Strategi pemerintah mencakup pengembangan akses pasar perikanan berorientasi ekspor dan memfasilitasi promosi produk lokal. Letak strategis Kota Tanjungpinang yang bertetangga dengan Singapura dan Malaysia membuka peluang pangsa pasar yang besar.	Industri dapat berpartisipasi aktif dalam pameran dan promosi yang diselenggarakan pemerintah untuk produk-produk kelautan yang menerapkan praktik berkelanjutan (misalnya, bersertifikat ramah lingkungan). Kolaborasi juga dapat diperluas untuk mengembangkan branding bersama bagi produk kelautan Tanjungpinang yang menjamin keberlanjutan dan kualitas.
5	Pengembangan Infrastruktur dan Iklim Investasi Berwawasan Lingkungan	Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi yang kondusif berwawasan lingkungan. Ini termasuk perbaikan infrastruktur di sektor kelautan seperti pelabuhan perikanan dan pabrik es. Pemerintah menyambut dan mendukung setiap investasi yang akan dibangun di kota Tanjungpinang	Industri dapat berpartisipasi dalam skema investasi ramah lingkungan di sektor kelautan, seperti investasi dalam teknologi penangkapan atau budidaya yang lebih efisien energi, fasilitas pengolahan limbah, atau pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal bagi investasi yang berkontribusi pada ekonomi biru
6	Pemantauan dan Penegakan Kebijakan Lingkungan	Pemerintah meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan/pencemaran lingkungan. Isu seperti pencemaran air dari sampah dan limbah industri, serta kerusakan ekosistem mangrove, menjadi perhatian	Industri harus mematuhi regulasi lingkungan yang ada dan berpartisipasi dalam program-program pemantauan lingkungan. Contohnya, industri pengolahan hasil laut harus memastikan pengelolaan limbahnya sesuai standar untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir. RTRW Kota Tanjungpinang juga memuat arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, termasuk regulasi untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan Tabel 1. Terdapat enam program kolaborasi pemerintah dan industri untuk menerapkan ekonomi biru yang memuat pendekatan holistik untuk pengembangan kelautan dan perikanan berkelanjutan, mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan kolaborasi industri. Dengan memprioritaskan keberlanjutan ekologi, peningkatan nilai ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, ekspansi pasar, peningkatan infrastruktur, dan kepatuhan regulasi, Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya menjadi model ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Sinergi ini mendorong ketahanan, daya saing, dan pengelolaan lingkungan, berkontribusi pada pembangunan regional dan tujuan keberlanjutan global.

## **B. Dampak kebijakan ekonomi biru terhadap pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang**

Kebijakan ekonomi biru di Kota Tanjungpinang berfokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak kebijakan ini terhadap pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari beberapa aspek utama, termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Kontribusi Kebijakan Ekonomi Biru terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tanjungpinang:

### **1. Optimalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi**

**Peningkatan Produksi Perikanan:** Kota Tanjungpinang memiliki potensi besar dalam perikanan karena luas lautnya yang mencapai 94,94 Km<sup>2</sup> atau sekitar 41,71% dari luas wilayahnya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mencapai 118.661 (total produksi perikanan). Realisasi produksi perikanan tangkap mencapai 4.385,24 ton pada 2023, melampaui target akhir RPJMD. Produksi perikanan budidaya juga melebihi target dengan realisasi 182,57 ton pada 2023. Upaya yang dilakukan termasuk pemberian bantuan kapal 1 GT kepada kelompok nelayan dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan

**Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan:** Potensi ikan segar hasil budidaya dapat dimanfaatkan untuk wisata kuliner dan industri olahan hasil perikanan yang menjadi ciri khas oleh-oleh Kota Tanjungpinang. Pemerintah juga mendorong pembangunan industri rumput laut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan nilai tambah. Namun, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) dan kontinuitas bahan produksi belum terjamin



**Pengembangan Akses Pasar:** Adanya dukungan untuk pengembangan akses pasar perikanan yang berorientasi ekspor merupakan strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor ini.

## 2. Peningkatan Pariwisata Berbasis Bahari dan Ekonomi Kreatif

**Peningkatan Kunjungan Wisata:** Sektor pariwisata merupakan motor penggerak perekonomian kota. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2023 mencapai 259.742 orang dan wisatawan mancanegara 52.202 orang, menunjukkan peningkatan signifikan meskipun target RPJMD belum tercapai sepenuhnya.

**Pengembangan Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau berupaya mengembangkan ekonomi kreatif, termasuk melalui peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk produk ekonomi kreatif.

## 3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengurangan Kesenjangan

**Penciptaan Lapangan Kerja:** Peningkatan sektor pariwisata, perdagangan, dan perikanan diharapkan dapat menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tingkat pengangguran masih cukup tinggi

**Pengentasan Kemiskinan:** Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas penanganan strategis, dengan program-program untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan memfasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat

**Pemberdayaan Kelompok Rentan:** Upaya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas PKK serta organisasi wanita dilakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam usaha ekonomi dan meningkatkan status sosial ekonomi.

## 4. Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur Pendukung

**Akses Air Bersih dan Sanitasi:** Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan peningkatan akses air bersih, dengan realisasi 65,95% rumah tangga memiliki akses air bersih pada tahun 2023, melampaui target RPJMD. Namun, akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak masih perlu terus ditingkatkan

**Penanganan Kawasan Kumuh:** Upaya dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan, meskipun target belum tercapai sepenuhnya karena keterbatasan anggaran dan permasalahan lahan.

**Konektivitas Antar Pulau:** Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan akses transportasi antar pulau sangat krusial untuk pemerataan akses dan kesempatan ekonomi, mengingat kondisi geografis Kepulauan Riau yang didominasi pulau-pulau.

## **5. Pelestarian Lingkungan Hidup**

**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup:** Pemerintah Kota Tanjungpinang berfokus pada penanganan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dan melampaui target yang direncanakan

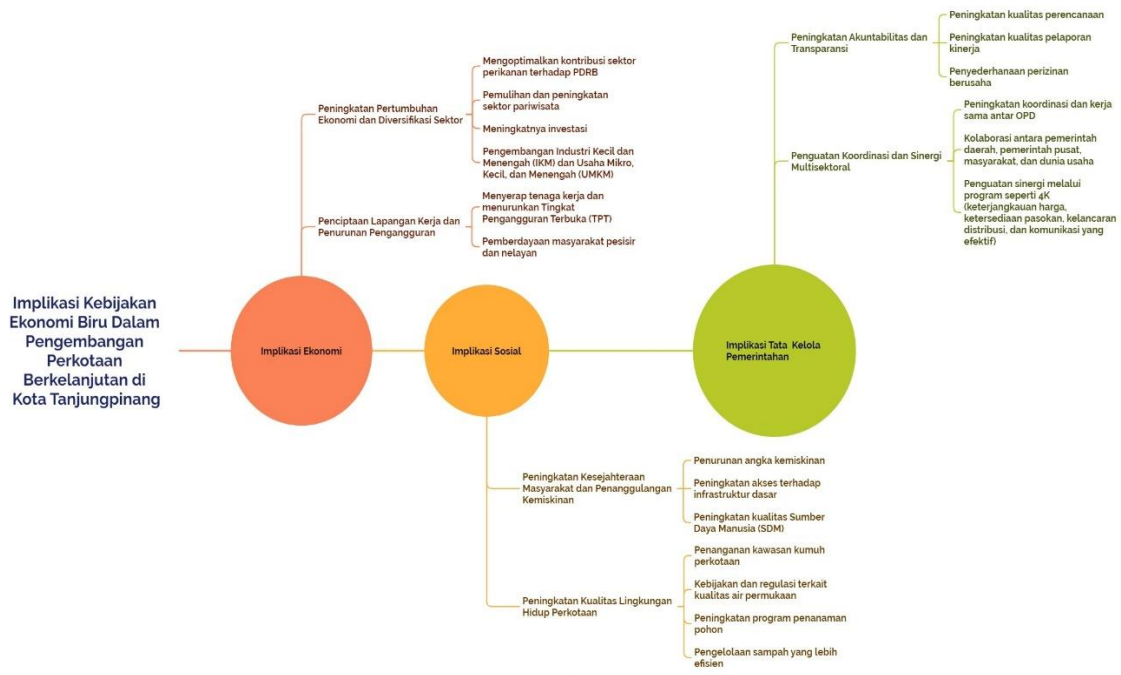
**Pengendalian Pencemaran:** Upaya perbaikan kebijakan dan regulasi terkait kualitas air permukaan serta identifikasi sumber pencemaran dan pengendalian limbah air dilakukan. Namun, permasalahan seperti pencemaran air laut dan limbah industri masih menjadi isu.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi biru di Kota Tanjungpinang berupaya memanfaatkan potensi maritimnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dampaknya terlihat dari peningkatan produksi perikanan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur dasar. Namun, masih diperlukan upaya konsisten untuk mengatasi tantangan terkait kualitas SDM, permodalan, promosi, dan koordinasi agar pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat tercapai secara merata dan optimal.

## **C. Implikasi kebijakan ekonomi biru untuk pengembangan perkotaan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang**

Implikasi kebijakan dari penerapan ekonomi biru untuk pengembangan perkotaan berkelanjutan di Tanjungpinang sangat luas. Kebijakan ini menuntut adanya perencanaan yang matang dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan politik yang kuat. Kebijakan yang dinamis dan fleksibel sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya laut dan pesisir, sekaligus mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi daerah pesisir perkotaan seperti Tanjungpinang, termasuk masalah infrastruktur, akses pasar, dan keterampilan sumber daya manusia. Strategi implementasi ekonomi biru di wilayah ini perlu mencakup peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi konsep ekonomi biru secara komprehensif agar prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara maksimal. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut merupakan

faktor krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan program ekonomi biru. Melimpahnya potensi di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi maritim, serta didukung fasilitas dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, Tanjungpinang berpeluang mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja baru, dan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak kelestarian lingkungan laut. Sehingga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang dikelola dengan baik. Implikasi ekonomi biru di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Hasil Analisis 2025

Pada gambar 1, menjelaskan penerapan kebijakan ekonomi biru di Kota Tanjungpinang menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Implikasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan investasi, implikasi sosial memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan implikasi Tata Kelola pemerintahan mendukung akuntabilitas dan sinergi multisektoral. Koordinasi antar sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Untuk hasil yang optimal, diperlukan evaluasi berkala dan dukungan teknologi guna memastikan keberlanjutan dampak positifnya di masa depan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru di Kota Tanjungpinang mencakup enam program kolaborasi utama antara pemerintah dan industri, yang membentuk pendekatan holistik untuk pengembangan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Kolaborasi bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi industri, dengan memprioritaskan keberlanjutan ekologi, peningkatan nilai ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, ekspansi pasar, peningkatan infrastruktur, dan kepatuhan regulasi. Program-program ini mencakup pengembangan sumber daya kelautan berkelanjutan, hilirisasi industri pengolahan hasil laut, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi akses pasar, pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan, serta pemantauan dan penegakan kebijakan lingkungan. Dampak kebijakan ekonomi biru terhadap pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang sangat multi-aspek:

**Aspek Ekonomi:** Terlihat dari optimalisasi sektor kelautan dan perikanan dengan peningkatan signifikan pada produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta dorongan untuk pengembangan industri pengolahan perikanan dan akses pasar berorientasi ekspor. Sektor pariwisata berbasis bahari juga menjadi penggerak ekonomi dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan ekonomi kreatif. **Aspek Sosial:** Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan di kawasan pesisir, dan pemberdayaan kelompok rentan seperti Perempuan. **Aspek Lingkungan:** Berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi risiko eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan jika tidak ada pengelolaan dan regulasi yang tepat. **Aspek Infrastruktur:** Ditopang oleh penyediaan dan pemerataan infrastruktur pendukung seperti akses air bersih, sanitasi, dan konektivitas antar pulau, yang krusial untuk pemerataan akses dan kesempatan ekonomi.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan ekonomi biru memberikan peluang besar bagi pengembang untuk memanfaatkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan demi pembangunan perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pendekatan tersebut mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pembangunan, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti keterbatasan skala produksi olahan perikanan, kontinuitas bahan produksi, tingkat pengangguran, kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, dan isu pencemaran dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya konsisten dalam mengatasi tantangan terkait kualitas SDM, permodalan, promosi, dan koordinasi, serta evaluasi berkala

dan dukungan teknologi untuk memastikan keberlanjutan dampak positif pembangunan perkotaan berkelanjutan di masa depan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Latif, M. F., & Wafa, S. N. (2023). Analisis kebijakan blue economy di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2), 95–106.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian kualitatif & desain riset*. Pustaka Pelajar.
- Darajati. (2023). Ekonomi biru: Peluang implementasi regulasi di Indonesia. *The Journalish*. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/599>
- Edoardus, & Ransta. (2020). Kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Merauke. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/866>
- Emiel, Cici, Khairunnisak, Muhammad, Julio, & Firma. (2024). Perkuat tata kelola perikanan: Menuju keseimbangan dan konservasi sumber daya laut melalui hukum perikanan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, <https://www.journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2600>
- Haeril. (2024). Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan pesisir di Kabupaten Bima. *Jurnal Government, Law, and Policy*, <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1235>
- Lutvia, Hadis, Dimas, Ariska, & Budiman. (2021). Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di Kota Sabang. *Education and Development Journal*, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3115>
- Noor. (2022). Blue sukuk: Strategi dan konsep pembiayaan. *Jurnal PKN STAN*, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1924>
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2023). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2023*.
- Rhofita. (2022). Optimalisasi sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional. *Semantic Scholar*. <https://pdfs.semanticscholar.org/172b/aa1b4bba0c5f6383a81d932c3063b4418283.pdf>
- Septian. (2021). Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam nilai Pancasila. *BHL: Jurnal Hukum Lingkungan*, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/208>
- Septianda. (2024). Strategi pengelolaan sumber daya alam sebagai pondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, <https://jurnal-archipelago.barenlitbang.kepriprov.go.id/index.php/JA/article/view/88>

- Sridadi. (2024). Penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi rumput laut melalui kolaborasi pengabdian masyarakat internasional. *Jana Loka: Jurnal Nasional Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat*, <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/49>
- Wulandari. (2015). Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan blue economy masa pemerintahan Joko Widodo. *Academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/100832825/3105.pdf>
- Yuli, Deden, Jumlah, & Kemiskinan. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, jumlah penduduk, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia: Analisa two. *Dinamika Pembangunan*, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika\\_pembangunan/article/view/33417](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/33417)